

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan perusahaan dapat diukur dari kinerja perusahaan yang dinilai baik. Kinerja suatu perusahaan dikatakan baik apabila sahamnya memiliki nilai yang meningkat di pasar modal. Selain dilihat dari pasar modal, kinerja perusahaan juga dapat dilihat dan diukur dari *return on assets* (ROA), karena menggambarkan efisiensi kegiatan operasi suatu perusahaan di pasar asset (Adiati, 2017). Maka dari itu, kinerja perusahaan penting untuk dipantau terus menerus perkembangannya (Aprilliani & Totok, 2018). Perusahaan yang mengalami permasalahan ekonomi, dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan investor di pasar modal, hal tersebut dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan tata kelola perusahaan yang komprehensif, seperti kerangka tata kelola perusahaan, pemegang saham, transparansi informasi, dan tanggung jawab dewan dan komite (Limena & Eriandani, 2020).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas bisnis dan kemampuan perusahaan untuk merespons risiko yang meningkat, perusahaan perbankan harus mampu mengidentifikasi masalah perbankan. Bagi bank, penilaian kinerja bank membantu mereka menerapkan strategi bisnis di masa depan. Untuk menilai kinerja bank, perlu dilakukan pengelolaan tingkat kesehatan bank. Karena keberhasilan suatu bank merupakan gambaran total dari tingkat keberhasilan yang telah dicapai bank dalam menjalankan usaha di berbagai bidang (Ekadjaja, 2018).

Perkembangan tata kelola perusahaan ditandai dengan kenyataan bahwa manajemen perusahaan tidak lagi dominan bagi pemegang saham, tetapi juga bagi pemangku kepentingan. Keseimbangan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) (Ekadjaja, 2018).

Good Corporate governance (GCG) yang baik membantu pengguna informasi keuangan untuk lebih yakin bahwa laporan keuangan yang

dihasilkan bebas dari kecurangan (*fraud*). Masalah GCG muncul karena pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. *Good Corporate governance* (GCG) sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, dan manajemen untuk mencapai manajemen perusahaan yang seimbang. Jika peran masing-masing bagian dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang perusahaan, maka sistem GCG dapat berfungsi secara efektif (Purnamasari, 2019).

Agar perusahaan dapat memantauan dan mengontrol sistem dengan efektif maka dibutuhkan dua pihak, yaitu komite independen dan komite audit. Keberadaan komite audit untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) serta dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen profit-making (manajemen pendapatan) dengan mengawasi laporan keuangan dan mengawasi audit eksternal (Abdullah, 2018). Berdasarkan peraturan pembentukan komite audit dan pedoman pelaksanaan kerja yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tujuan pembentukan komite audit adalah untuk melaksanakan tugasnya. menjamin tata kelola perusahaan. Komite audit yang merupakan bagian dari direksi merupakan pihak yang memiliki akses dan mekanisme komunikasi langsung dengan berbagai pihak di seluruh elemen manajemen perusahaan (Ichsany & Husain, 2019).

Besar kecilnya komite audit dapat dinyatakan dengan jumlah anggota komite audit. Mengikuti peraturan BAPEPAM No. IX.1.5. jumlah anggota komite audit paling sedikit tiga orang yang mewakili pemegang saham, direksi, dan orang independen. Jumlah anggota komite audit dapat menggambarkan efektivitas komite audit menjalankan fungsi pengawasannya selama penyusunan laporan keuangan. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka semakin besar pula gesekan yang terjadi di dalam komite audit, sehingga mempengaruhi pengawasan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan (Abdullah, 2018).

Menurut Alzoubi & Selamat (2012), pemegang saham tergantung pada kemampuan untuk mengawasi kegiatan direksi dan komite Audit. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kualitas informasi keuangan terletak pada efektivitas peran dewan direksi dan komite audit. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada peran komite audit sebagai aktor kunci dalam memastikan integritas laporan keuangan dan menangani masalah yang terkait dengan audit eksternal. Semakin baik (buruk) corporate governance maka semakin tinggi (rendah) kinerja perusahaan tersebut.

Karakteristik dewan direktur dan kepemilikan saham sering digunakan dalam mekanisme *Good Corporate Governance*. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan karakteristik tim manajemen puncak khususnya rapat dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit. Adanya komite memiliki keunggulan dalam melaksanakan tugas-tugas yang lebih detail, dengan fokus pada bagaimana pengaturan (Governance) manajemen.

Karakteristik dewan komisaris yang akan mempengaruhi efektivitas adalah kegiatan dewan dalam hal melakukan rapat dewan. Dewan komisaris yang aktif dan mengadakan pertemuan rutin akan dapat melakukan pemantauan yang lebih sistematis dan efektif (Praptitorini, 2018). Dalam (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) No. 33/POJK.04/2014, pasal 31 ayat 1, menyebutkan dewan komisaris diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Diadakan rapat untuk mengulas dan memastikan bahwa tujuan dan kinerja perusahaan dalam perencanaan strategis, pembiayaan, akuisisi, divestasi, operasi, manajemen risiko dan tata kelola dapat dicapai sesuai dengan tujuan perusahaan.

Dewan direksi merupakan salah satu fungsi terpenting dari sebuah perusahaan. Dalam struktur tata kelola perusahaan, ukuran dewan direksi merupakan mekanisme penting dalam menentukan kinerja perusahaan (Sukandar & Rahardja, 2014). Semakin tinggi jumlah anggota dewan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan tersebut (Limena & Eriandani, 2020).

Peran komite audit sering dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan karena dapat membantu dewan direksi memantau proses pelaporan keuangan oleh dewan direksi untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan (Prastiti & Meiranto, 2013). Dengan mengadakan rapat dewan direksi dapat menjadi faktor yang mampu meningkatkan kinerja keuangan, serta memberikan peluang bagi dewan direksi dalam membicarakan kondisi perusahaan (Jao et al., 2021). Berdasarkan penelitian (Mardiyati, 2018) menemukan hasil bahwa, frekuensi rapat dewan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti faktor yang bisa memperbaiki kinerja perbankan secara signifikan. Faktor-faktor yang dipilih adalah X1 sampai dengan X3 berdasarkan *Effective Effort Hypothesis* dan *Decision Paralysis Hypothesis*. Penelitian ini menggunakan data rapat tim manajemen puncak yang dipublikasikan pada laporan tahunan perusahaan untuk menganalisis hubungan antara frekuensi rapat tim dewan komisaris, dewan komisaris, dan komite audit dengan kinerja perusahaan. Hal ini dilakukan oleh peneliti sesuai dengan yang dilakukan oleh (Harymawan et al., 2020). Peneliti mengusung topik ini dalam sebuah skripsi yang bertajuk “Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Dan Komite Audit Dengan Kinerja Perusahaan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh frekuensi rapat dewan direksi terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh frekuensi rapat dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap kinerja perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi atau tambahan referensi pada pengembangan teori, terutama kajian manajemen keuangan mengenai *agency theory* dan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dengan menilai efektivitas dari frekuensi rapat dewan dalam sebuah perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan landasan dan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

1.1.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan bahan evaluasi mengenai keefektifan regulasi penerapan mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia sehingga dapat menetapkan standar yang lebih baik di masa yang akan datang.